

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Ghofur Anshori,, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009,
- Adjie, Habib, 2008. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004)*. Bandung: Refika Aditama.
- Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Mocomedia, Yogyakarta, 2009,
- Amiruddin, et.all, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Anshori, Abdul Ghofur 2009. *Lembaga Kenotariatan, Prespektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Damang., & Nusa, A. (2017). *Asas dan Dasar – Dasar Ilmu Hukum (Suatu Pengantar Praktis Menuju Pemahaman Ilmu Hukum Secara Kompherensif)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha “studi konsep pembuktian terhadap perjanjian penetapan harga dalam persaingan usaha”*, Setara Press, Malang, 2013,
- Dillah, Suratman Philips, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Djuaeni, Adrian, 2014. *Kode Etik Notaris*. Bandung: Laras.
- Habib Adjie. 2009. *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Habib, Adjie. (2008). *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notori*, Bandung: Rafika Aditama
- Hadjon, Philipus M, (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Habib, Adjie (2011). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Habib, Adjie (2015). *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: PT Refika Aditama.

- Habib, Adjie 2008. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004)*. Bandung: Refika Aditama.
- Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2008,
- Kartini Soefjendro. 2001. *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang berpotensi Konflik..* Yogyakarta: Kanisius.
- Mamudji, S. (2009). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Priyambodo, Y., & Gunarto, G. (2017). "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Akta*, 4(3), 331-338. h.337. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i3.1805>
- R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,
- Rhiti, Hyronimus, 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetakan Kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya,
- Salim HS, 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sidartha, 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta,
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tobing, GHS Lumban, 1996. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

C. JURNAL

Gunawan, I Ketut Adi, et.all., 2020. *Penetapan Honorarium Notaris dalam Praktik Pelaksanaan Jabatan Notaris*. *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol 1 No 2.

Manan Abdul, et.all., 2019. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Penerapan Honorarium Notaris*. *Journal of Legal Research* Vol 55 No.3

Prayitno, Imam Suko dan Erna Anggraini Hutabarat, 2019. *Akibat Hukum Perhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Honorarium Akta Notaris*. *Res Judicata* Vol 2 No.1.

Putri, Nindy dan Paramita Prananingtyas, 2019. *Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) Dalam Penetapan Tarif Kota Balikpapan*. *Notarius* Vol 12 No. 1.

Faridah, K., Khalimi, K., & Ismed, M. (2023). Kepastian Hukum dan Pengawasan Honorarium PPAT sebagai Upaya untuk Penyetaraan Pelayanan dan Mewujudkan Keadilan bagi Masyarakat. *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 65-72. h. 70. DOI: <https://doi.org/10.32884/jih.v1i2.1438>

Edwar, A. Rani, F., & Ali, D, 2019, Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep Equality Before The Law. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9 (2), 207-219

Henny Saida Flora, “Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 57, Tahun 2012, url: <http://jurnal.unsyiah.ac.id/>

Ariy Yandillah, Sihabudin dan Herlin Wijayanti, “Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya”, *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, url: <https://media.neliti.com/publications>

Wtta Depriani, Ridwan, Agus Trisaka, 2021, “Perlindungan Hukum Notaris Pengganti Yang Tidak Mengetahui Adanya Identitas Palsu Dari Para Pihak”, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Vol. 10, No. 1,

I ketut Gunawan Adi dkk, Penetpan Honorarium Notaris dalam Praktik Pelaksanaan Jabatan Notaris, *Jurnal Kontruksi Hukum* Vol.1 No 2 Oktober 2020.

Sari, D. A. P. (2016). Makna Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu Terkait Sanksi Yang Diberikan Oleh Undang-undang Jika Tidak Dipenuhi (Analisis Pasal 37 Ayat (1) Dan (2) Undang-undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, h

Mahmoud, A. R. (2014). Implikasi Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*,

Sari, D. A. W., Murni, R. R., & Udiana, I. M. (2018). Kewenangan Notaris Di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Acta Comitas*, h. 222

Ratna Madyastuti, 2020. “Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan dan Tugas Jabatan Notaris”, *Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 3,

Ria Trisnomurt, et al, 2017. “Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris”, *Jurnal Notariil*, Vol. 2, No. 2,

D. ARTIKEL DAN BERITA

Fattah, Damanhuri, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*. Terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>. Diakses terakhir kali tanggal 24 November 2024.

Saleh, Ismail, *Membangun Citra Profesional Notaris Indonesia, Pengarahan Ceramah Umum Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada Upgrading Refresing Course Notaris se-Indonesia*, Bandung

